

PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS

Patricia Diana

Universitas Multimedia Nusantara

patricia@umn.ac.id

Chermian Eforis

Universitas Multimedia Nusantara

chermian@umn.ac.id

Maria Stefani Osesoga

Universitas Multimedia Nusantara

maria.stefani@umn.ac.id

Diterima 11 Januari 2018

Disetujui 06 Desember 2018

Abstract- The purpose of this study was to examine the impact of the implementation of Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) toward financial report quality of local government in Nias Selatan. The Indonesian government has encouraged each region to implement Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA is an e-government system developed by the Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah in order to improve internal control in regional reporting, including local government financial reports. The study was conducted using a survey method to provide the questionnaires to Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Program, and Bendahara in 63 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Nias Selatan. The data used in this study was primary data. There were 154 questionnaires distributed for this research, but only 140 questionnaires returned and used in this research. Data processing using SPSS 24 application with simple regression method. The result of this study was implementation of Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) has significant impact toward financial report quality of local government in Nias Selatan.

Keywords: *financial report quality, local government financial statements, SIMDA*

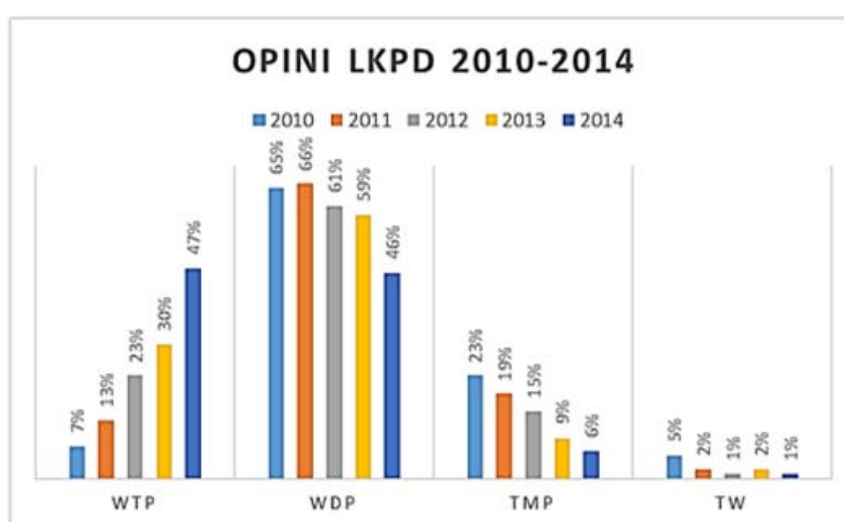
I. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki luas area besar memerlukan adanya sistem pemerintahan yang terintegrasi. Salah satu usaha pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah tertuang dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menghasilkan 34 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota.

Sistem desentralisasi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada setiap kepala daerah untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk dapat memastikan kesejahteraan masyarakat di daerahnya masing-masing. Penerapan otonomi dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan

penyesuaian kebijakan terkait kepentingan dan kondisi daerah, memperpendek birokrasi, meningkatkan pengawasan memberikan peluang inovasi dan kreativitas yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan.

Banyaknya jumlah daerah otonom dan tingginya kebutuhan informasi yang akurat bagi pemerintah pusat dalam pembentukan kebijakan secara nasional bagi seluruh kepentingan masyarakat, membuat semakin diperlukannya sistem pelaporan keuangan yang memadai. Kebutuhan akan sistem akuntansi pemerintah daerah yang mampu menyajikan informasi keuangan yang akurat juga tercermin dalam tingginya angka Laporan Keuangan Daerah (LKPD) yang masih memperoleh opini selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan laporan BPKP tahun 2015, sebanyak 35 LKPD memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dan sebanyak 5 LKPD memperoleh opini Tidak Wajar (TW). Berikut data yang menunjukkan hasil pemeriksaan laporan Pemda yang telah dilakukan oleh BPK selama periode 2010–2014:



sumber: IHPS II Tahun 2015 (BPK RI)

Gambar 1. Opini yang diberikan BPK kepada KPD periode 2010-2014

Berdasarkan Gambar 1., menunjukkan bahwa dari tahun 2010 – 2014 rata-rata LKPD yang mendapatkan opini selain WTP masih cukup tinggi yaitu sebesar 76%. Walaupun demikian, terdapat peningkatan LKPD yang memperoleh opini WTP yaitu sebesar 7% pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 47% pada tahun 2014.

Peningkatan opini dapat terjadi karena data dalam laporan keuangan daerah telah sesuai dengan standar penyusunan laporan keuangan daerah dan disajikan dalam format yang tepat. Agar data keuangan ini dapat dicatat dengan akurat, maka perlu adanya sistem yang terintegrasi sesuai kebutuhan penyusunan laporan keuangan daerah. Salah satu sistem pelaporan keuangan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA merupakan program aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memberikan *database* mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah. Aplikasi dalam SIMDA meliputi bidang keuangan, pengelolaan barang milik daerah, gaji dan pendapatan. Sampai dengan tahun 2016, jumlah Pemerintah Daerah (PEMDA) yang menggunakan SIMDA terus meningkat. Berikut ini merupakan tabel jumlah pemerintah daerah per Januari 2016 yang sudah menggunakan SIMDA:

Tabel 1. Implementasi SIMDA per Januari 2016

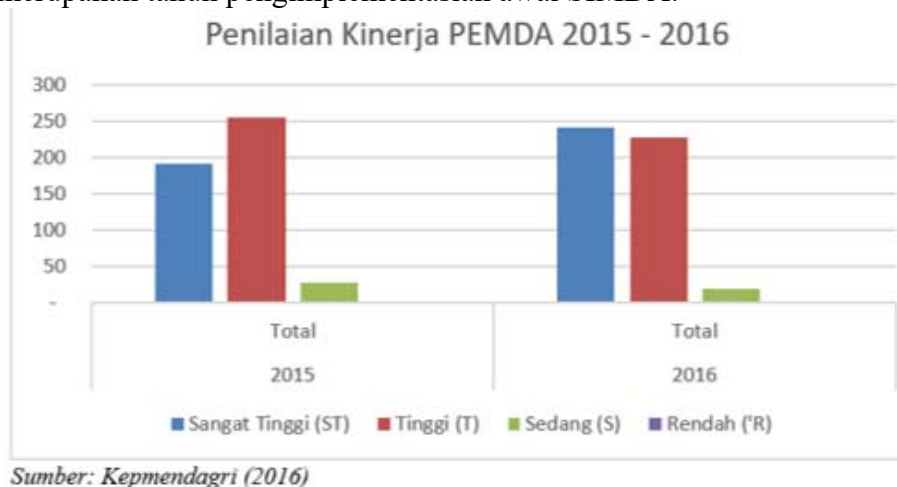
Sumber: BPKP (2016)

No.	Jenis Implementasi	Jumlah Pemda
1	Pengguna SIMDA	425
2	SIMDA Keuangan	365
3	SIMDA BMD	347
4	SIMDA Gaji	69
5	SIMDA Pendapatan	55

Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu contoh pemerintah daerah yang sudah mulai menggunakan SIMDA di akhir tahun 2016 sebagai alat penunjang tata kelola daerah. Sebelum menggunakan SIMDA, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Efisiensi dan penghematan biaya merupakan beberapa contoh penyebab peralihan dari SIPKD ke SIMDA. SIMDA dipandang memiliki kemampuan untuk mengakomodir keinginan Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan anggaran dan juga pelaporan keuangan.

Nias Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang berdiri pada tanggal 25 Februari 2003 setelah sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Nias. Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan pada awalnya memiliki total 63 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terdiri dari 28 kantor badan dan 35 kantor kecamatan. Jumlah SKPD sempat mengalami perubahan signifikan pada periode 2011-2015 menjadi hanya terdapat 12 SKPD. Pemerintah Daerah yang baru terpilih di tahun 2016 mengubah kembali jumlah SKPD sehingga menjadi total 63 SKPD. SKPD merupakan pihak-pihak yang menggunakan SIMDA untuk pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan SIMDA di Kabupaten Nias Selatan memberikan dampak positif yang tercermin dari peningkatan penilaian kinerja oleh Menteri Dalam Negeri pada laporan tentang penetapan peringkat dan status kerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional yang diterbitkan setiap tahun. Penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dibagi dalam 4 kategori, yaitu: Sangat Tinggi (ST), Tinggi (T), Sedang (S) dan Rendah (R). Pada tahun 2015, Nias Selatan memperoleh penilaian Sedang, namun pada tahun 2016 setelah pengimplementasian SIMDA, Nias Selatan mengalami peningkatan penilaian kinerja menjadi Tinggi. Pengimplementasian SIMDA dalam penilaian kinerja PEMDA juga berdampak secara nasional. Berikut merupakan grafik peningkatan penilaian kinerja PEMDA dari tahun 2015 – 2016 yang merupakan tahun pengimplementasian awal SIMDA:



Gambar 2. Penilaian Kinerja PEMDA periode 2015-2016

Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sebanyak 191 kota dan kabupaten yang mendapat penilaian Sangat Tinggi, namun jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 26% pada tahun 2016 menjadi sejumlah 241 kota dan kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah daerah digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi, serta membantu penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dibutuhkan laporan keuangan yang berkualitas dengan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Kualitas laporan keuangan akan berbeda untuk setiap daerah tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yaitu pengimplementasian sistem informasi akuntansi seperti SIMDA dapat mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan. Penggunaan SIMDA dapat meningkatkan keamanan data karena hanya pihak yang memiliki otoritas yang dapat melakukan akses informasi dan memungkinkan penggunaan untuk dapat secara cepat mengakses data yang diperlukan. Penggunaan sistem juga dapat mencegah terjadinya kesalahan perhitungan sehingga meningkatkan ketelitian. SIMDA mampu mengolah data dan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan komponen laporan keuangan sehingga luaran yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan sistem informasi yang dapat meningkatkan keamanan data, keakuratan dan menghasilkan laporan yang sesuai dengan kebutuhan akan meningkatkan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevansi, keandalan dan kemampuan untuk dapat dipahami sehingga kualitas laporan meningkat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alfian (2015) menyatakan bahwa penggunaan SIMDA khususnya pada SKPD di Kulon Progo Yogyakarta dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Harbelubun, Kalangi dan Lambey (2017) berpendapat bahwa penerapan SIMDA yang tepat sasaran harus didukung oleh penerapan internal control serta komunikasi dan komitmen dari masing-masing pemerintah daerah. Hal serupa juga diutarakan oleh Ole (2014) yang menyatakan bahwa penerapan SIMDA pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

Apakah implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

II. Tinjauan Literatur dan Hipotesis

Nias Selatan

Nias Selatan merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dan terletak di Kepulauan Nias. Status otonomi daerah diresmikan pada tanggal 28 Juli 2003 setelah sebelumnya menyatu dengan Kabupaten Nias. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nias Selatan, jumlah penduduk di tahun 2017 sebesar 314.395 jiwa. Wilayah administrasi terdiri dari 35 kecamatan dan 461 desa/kelurahan. Kabupaten Nias Selatan memiliki 104 buah pulau besar dan kecil dimana hanya 21 buah pulau yang dihuni, sisanya, 83 buah pulau tidak dihuni. Kondisi jalan baik hanya mencapai 276,91 km atau sebesar 31,80% dari total jalan. Sementara kondisi rusak dan rusak berat mencapai 24,51% dan 24,12% dan sisanya dengan kondisi sedang. Sebagian besar penduduk (85,65 %) bekerja pada sektor pertanian. Tingkat pendidikan pekerja didominasi pendidikan SD ke bawah (49,73 %), diikuti SMTA (26,34 %) dan SMTP (17,85%). Hanya 6,08% yang berpendidikan di atas SMTA.

Badan Pemeriksaa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melalui situsnyaa menyatakan hasil pemeriksaaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Nias Selatan sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau *disclaimer of opinion*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Keuangan Daerah yaitu: “semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.”

Berikut ini penjelasan mengenai istilah-istilah dalam pemerintah daerah:

- a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah ialah kepala daerah.
- b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- c. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Kepala SKPD menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya untuk kemudian disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai dasar pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintahan menyatakan bahwa peranan dari laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode. Informasi tentang nilai sumber daya ekonomi ini dimanfaatkan untuk menjalankan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan dan mengevaluasi keefektifan & efisiensi entitas pelaporan dan menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengguna laporan keuangan pemerintah antara lain adalah masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman serta pemerintah sendiri. Agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi fungsinya, maka harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2004) di dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yaitu:

1. Relevan: informasi yang memiliki manfaat umpan balik; manfaat prediktif; tepat waktu; lengkap
2. Andal: informasi yang memenuhi karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas
3. Dapat dibandingkan: informasi dapat lebih berguna apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya

4. Dapat dipahami: informasi dapat dipahami dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna

Penyusunan laporan keuangan pemerintah menggunakan asumsi kemandirian entitas, kesinambungan dan keterukuran dalam satuan uang. Kemandirian entitas berarti setiap unit organisasi dianggap mandiri dan memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporannya. Komponen laporan keuangan pemerintah meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Opini Audit

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, pasal 16 bagian penjelasan, definisi opini audit ialah:

“Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern”

Bagian Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 di pasal 16 ayat (1) menyebutkan opini audit terdiri atas 4 jenis yaitu,

- a. Opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)
- b. Opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)
- c. Opini tidak wajar (*adversed opinion*)
- d. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*)

Standar Audit (SA) 705 menyatakan bahwa auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif.

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Situs Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau disingkat BPKP, (2018) menyebutkan, pengembangan SIMDA ditetapkan oleh Deputy Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah untuk mendukung capaian indikator kinerja “Meningkatnya Tingkat Opini BPK terhadap LKPD”. Tujuan pengembangan program aplikasi ini menurut BPKP (2018) ialah:

1. Menyediakan *database* mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah;
2. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan;

3. Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik;
4. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah

Program aplikasi SIMDA Keuangan ialah salah satu hasil pengembangan produk SIMDA yang digunakan untuk pengelolaan keuangan secara terintegrasi. Keluaran dari aplikasi SIMDA Keuangan ialah penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi dan pelaporan. Akuntansi dan pelaporan berisi jurnal, buku besar, buku pembantu, laporan keuangan, Perda pertanggungjawaban dan penjabarannya.

Keunggulan dan manfaat SIMDA menurut situs BPKP (2018) ialah:

1. Sesuai peraturan perundang-undangan (contoh: UU No.17 tahun 2003 dan UU No. 1 tahun 2004)
2. Terintegrasi karena menggunakan teknologi *multi user* dan teknologi *client/server*, dari penyusunan dan pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan di SKPD sehingga mempunyai keuntungan:
 - a. Pengendalian transaksi terjamin,
 - b. Efisien dalam melakukan penatausahaan
 - c. Cepat, akurat, dan efisien dalam menghasilkan informasi keuangan
3. *Transfer of knowledge* dari BPKP kepada pemerintah daerah
4. Kesenambungan pemeliharaan
5. Mudah digunakan

SIMDA dan Kualitas Laporan Keuangan

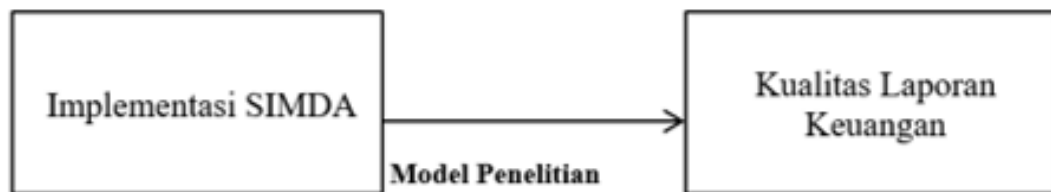
Alfian (2015) menemukan bahwa implementasi SIMDA pada SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki pengaruh positif terhadap laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto (2015) terhadap implementasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) untuk salah satunya mengetahui karakteristik kualitas informasi laporan hasil keluaran yang dihasilkan SIMDA-BMD. Hasil penelitian menunjukkan informasi yang dihasilkan sudah memiliki kualitas relevan, namun belum sepenuhnya andal karena nilai buku yang dilaporkan masih sama dengan nilai perolehannya karena aplikasi belum memiliki fasilitas penyusutan.

Dewi dan Mimba (2014) melakukan penelitian pengaruh sistem informasi, dalam hal ini Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPKD di Pemerintah Kota Denpasar berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Ole (2014) melalui kuesioner yang dibagikan kepada para pejabat di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di Kabupaten Minahasa menunjukkan laporan keuangan yang dihasilkan SIMDA memuat isi informasi berdasarkan standar kualitatif yang ada. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha: Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Model Penelitian

Berikut ini adalah model yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 3. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *causal study*. *Causal study* adalah suatu studi penelitian yang dilakukan untuk menentukan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih (Sekaran dan Bougie, 2016). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh implementasi sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan adalah laporan keuangan lengkap (Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan) yang memberikan informasi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan SKPD. Dalam penelitian ini digunakan 4 indikator untuk mengukur kualitas laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Penelitian ini menggunakan kuesioner Dewi dan Mimba (2014) yang terdiri dari 11 pernyataan, dimana semuanya adalah pernyataan positif. Variabel ini diukur dengan skala interval menggunakan skala *likert* dengan pemberian skor 1 untuk sangat tidak setuju, skor 2 untuk tidak setuju, skor 3 untuk netral, skor 4 untuk setuju, dan skor 5 untuk sangat setuju.

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah implementasi sistem informasi manajemen daerah. Implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) adalah penggunaan produk SIMDA untuk pengelolaan keuangan secara terintegrasi. Keluaran dari aplikasi SIMDA Keuangan ialah penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi dan pelaporan. Akuntansi dan pelaporan berisi jurnal, buku besar, buku pembantu, laporan keuangan, Perda pertanggungjawaban dan penjabarannya. Dalam penelitian ini digunakan 5 indikator untuk mengukur implementasi SIMDA, yaitu keamanan data, kecepatan dan ketepatan waktu akses, ketelitian, variasi laporan atau *output*, dan relevansi/kesesuaian. Penelitian ini menggunakan kuesioner Dewi dan Mimba (2014) yang terdiri dari 14 pernyataan, dimana semuanya adalah pernyataan positif. Variabel ini diukur dengan skala interval menggunakan skala *likert* dengan ketentuan sebagai berikut:

- indikator keamanan data: pemberian skor 1 untuk sangat tidak aman, skor 2 untuk tidak aman, skor 3 untuk kurang aman, skor 4 untuk aman, dan skor 5 untuk sangat aman.
- indikator kecepatan dan ketepatan waktu akses: pemberian skor 1 untuk sangat lambat, skor 2 untuk lambat, skor 3 untuk kurang cepat, skor 4 untuk cepat, dan skor 5 untuk sangat cepat.
- indikator ketelitian: pemberian skor 1 untuk sangat tidak teliti, skor 2 untuk tidak teliti, skor 3 untuk kurang teliti, skor 4 untuk teliti, dan skor 5 untuk sangat teliti.
- indikator variasi laporan atau *output*: pemberian skor 1 untuk sangat tidak variatif, skor 2 untuk tidak variatif, skor 3 untuk kurang variatif, skor 4 untuk variatif, dan skor 5 untuk sangat variatif.
- indikator relevansi/kesesuaian: pemberian skor 1 untuk sangat tidak relevan, skor 2 untuk tidak relevan, skor 3 untuk kurang relevan, skor 4 untuk relevan, dan skor 5 untuk sangat relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang selanjutnya dianalisis untuk menemukan solusi atas masalah yang diteliti (Sekaran dan Bougie, 2016). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang terlebih dahulu telah disusun secara tertulis dan sistematis oleh penulis. Kuesioner disebarkan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Program, dan Bendahara yang bertugas di 63 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nias Selatan. Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut terdiri dari 28 Kantor Badan dan 35 Kantor Kecamatan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan

No.	Kantor Badan	Kantor Kecamatan
1	Dinas Pendidikan	Kantor Camat Teluk Dalam
2	Dinas Kesehatan	Kantor Camat Lahusa
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kantor Camat Amandaraya
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kantor Camat Lolowau
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kantor Camat Lolomatua
6	Dinas Perhubungan	Kantor Camat Gomo
7	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Camat PP. Batu
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kantor Camat Hibala
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Kantor Camat Susua
10	Dinas Sosial	Kantor Camat Maniamolo
11	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	Kantor Camat Hilimegai
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Kantor Camat Toma
13	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	Kantor Camat Mazino
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kantor Camat Umbunasi
15	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Camat Aramo
16	Sekretariat Daerah	Kantor Camat PP. Batu Timur
17	Sekretariat DPRD	Kantor Camat Mazo
18	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Kantor Camat Fanayama
19	Inspektorat	Kantor Camat Uluovo
20	Badan Kepegawaian Daerah	Kantor Camat Huruna
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kantor Camat O'ou
22	Dinas Ketahanan Pangan	Kantor Camat Onohazumba
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Kantor Camat Hilisilawa'ahe
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kantor Camat Ulu'susua
25	Dinas Perpustakaan	Kantor Camat Sidua'ori
26	Dinas Pertanian	Kantor Camat Somambawa
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kantor Camat Boronadu
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kantor Camat Simuk
29		Kantor Camat PP. Batu Barat
30		Kantor Camat PP. Batu Utara
31		Kantor Camat Tanah Masa
32		Kantor Camat Luahagundre Maniamolo
33		Kantor Camat Ulu Idanotae
34		Kantor Camat Idanotae
35		Kantor Camat Onolahu

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alat bantu yang dapat membantu dalam menganalisis data yaitu dengan program IBM SPSS. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

Uji Hipotesis

Persamaan regresi linear sederhana dalam penelitian ini dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:

$$KLK = a + b_1SIMDA + e$$

Keterangan:

KLK : Kualitas Laporan Keuangan
 a : Konstanta
 b1 : Koefisien Regresi
 SIMDA : Implementasi SIMDA
 e : Error

IV. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Responden

Data yang diolah dalam penelitian ini merupakan jawaban para responden (Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Program, dan Bendahara) atas kuesioner yang telah didistribusikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan dan SKPD Kecamatan yang berlokasi di Kabupaten Nias Selatan. Proses penyebaran kuesioner dilakukan mulai pada tanggal 11 April 2018-13 April 2018. Sedangkan proses pengumpulan kuesioner dilakukan mulai tanggal 11 April 2018-21 Juni 2018. Kuesioner didistribusikan ke 28 SKPD Badan dan 35 SKPD Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Nias Selatan. Jumlah kuesioner yang didistribusikan sebanyak 154 kuesioner. Dari 154 kuesioner yang didistribusikan, terdapat 140 kuesioner yang kembali atau sebesar 90,90%. Dari kuesioner yang kembali tersebut sebanyak 140 kuesioner dapat digunakan sebagai sampel penelitian.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum, dan *sum* (Ghozali, 2018). Perhitungan statistik deskriptif untuk seluruh variabel penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KLK	140	32	22	54	42.49	7.534
SIMDA	140	24	45	69	57.76	6.063
Valid N (listwise)	140					

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan menggunakan alat uji Korelasi Pearson. Hasil pengujian validitas data disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Sig (2-tailed)	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan	0,000-0,018	Valid
Sistem Informasi Manajemen Daerah	0,000-0,014	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel kualitas laporan keuangan yang terdiri dari 11 pernyataan dan variabel sistem informasi manajemen daerah yang terdiri dari 14 pernyataan memiliki *sig. (2-tailed)* sebesar 0,000-0,0018 atau dibawah 0,05. Hal ini berarti semua pernyataan pada variabel adalah valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha*. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Kualitas Laporan Keuangan	0,916
Sistem Informasi Manajemen Daerah	0,877

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan, diperoleh hasil *Cronbach's Alpha* untuk variabel kualitas laporan keuangan adalah sebesar 0,916 dan variabel sistem informasi manajemen daerah sebesar 0,877. Hal ini menunjukkan kedua variabel yang diuji memiliki *Cronbach's Alpha* di atas 0,7 sehingga dikatakan *reliable*.

Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.807 ^a	.651	.648	4.469

a. Predictors: (Constant), SIMDA

b. Dependent Variable: KKK

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai R (koefisien korelasi) adalah 0,807 dan nilai ini mendekati 1 sehingga menunjukkan korelasi yang kuat antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian, dari hasil pengujian juga dapat dilihat nilai *R Square* sebesar 0,651. Hal ini berarti sebesar 65,1% variabel kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel independen yang diteliti, yaitu sistem informasi manajemen daerah (SIMDA). Sisanya sebesar 34,9% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model penelitian.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Dari uji signifikansi simultan yang telah dilakukan, diperoleh hasil seperti berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Signifikansi Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5133.336	1	5133.336	257.071	.000 ^b
	Residual	2755.657	138	19.969		
	Total	7888.993	139			

a. Dependent Variable: KKK

b. Predictors: (Constant), SIMDA

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan, dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 257,071 dengan signifikansi 0,000 atau dibawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi kualitas laporan keuangan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa model regresi dalam menaksir nilai aktual sudah tepat atau model *fit*.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Dari uji signifikansi parameter individual yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-15.408	3.631	-4.243	.000
	SIMDA	1.002	.063	.807	.000

Dari hasil pengujian yang dilakukan, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$KLK = -15,408 + 1,002SIMDA$$

Keterangan:

KLK : Kualitas Laporan Keuangan

SIMDA : Sistem Informasi Manajemen Daerah

Berdasarkan persamaan regresi yang dihasilkan, dapat dilihat bahwa variabel independen, yaitu sistem informasi manajemen daerah memiliki hubungan positif terhadap kualitas audit. Pengaruh positif tersebut dapat dilihat melalui nilai koefisien korelasi parsial, yaitu 1,002.

Variabel sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) memiliki koefisien regresi sebesar 1,002. Hal ini berarti setiap penambahan atau kenaikan satu satuan SIMDA, maka akan terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan sebesar 1,002. Berdasarkan Tabel 4.11, SIMDA mempunyai nilai t sebesar 16,033 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa H_a diterima sehingga dapat disimpulkan variabel SIMDA memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi penggunaan sistem informasi manajemen daerah, maka kualitas laporan keuangan akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Alfian (2015) dan Ole (2014) yang menyatakan bahwa implementasi SIMDA berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

V. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dari nilai statistik t sebesar 16,033 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa H_a diterima. Besarnya pengaruh implementasi SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka diharapkan pemerintah daerah lainnya juga dapat ikut menerapkan SIMDA dalam penyusunan laporan keuangannya.

Keterbatasan dari penelitian yang dilakukan antara lain kurangnya pemahaman dan kompetensi pegawai SKPD Nias Selatan terhadap proses pembuatan laporan keuangan daerah dan implementasi SIMDA mengakibatkan jawaban responden yang beragam. Selain itu, kondisi geografis pulau Nias dan infrastruktur yang tersedia menghambat proses penyebaran dan pengumpulan kuesioner. Untuk itu, disarankan agar pegawai yang menjalankan SIMDA pada SKPD Nias Selatan (Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Program, dan Bendahara) memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau sudah menjalani pelatihan terkait implementasi SIMDA. Selain itu, pemerintah sebaiknya menyediakan fasilitas, baik perangkat komputer maupun jaringan internet yang mendukung penggunaan sistem informasi

serta menggiatkan sosialisasi implementasi SIMDA atau memberikan pelatihan secara bertahap dan berkala kepada pegawai yang terlibat agar penggunaan SIMDA menjadi lebih efektif dan efisien serta memberikan hasil yang maksimal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

VI. Daftar Pustaka

- Alfian, M. (2015). Faktor Pendukung Implementasi SIMDA dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(3), 119-131. doi:<https://doi.org/10.24914/jeb.v18i3>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2017). *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (n.d.). *Situs Resmi BPKP 2018*. Retrieved from Situs Resmi BPKP 2018: <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp>
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Kabupaten Nias Selatan dalam Angka: Nias Selatan Regency in Figures 2018*. (B. P. Selatan, Ed.) Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan.
- Dewi, P. A., & Mimba, N. P. (2014). Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Kualitas Laporan Keuangan . *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 442-47.
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. (2018). *OTDA Kemendagri*. Retrieved October 9, 2018, from OTDA Kemendagri: http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/total_daerah_otonom.pdf
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang, Jawa Tengah: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harbelubun, A. V., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Analisis Penggunaan Aplikasi SIMDA dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 di Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(2). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/17166>
- Kementerian Dalam Negeri. (2016). *Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2015*. Jakarta, Indonesia
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2004). *Standar Akuntansi Pemerintahan: Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan*.
- Ole, H. R. (2014). Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Kasus pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara). *Accountability Journal*, 3(2). doi: <https://doi.org/10.32400/ja.6419.3.2.2014.1-15>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta.

Supriyanto. (2015). Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 13, 70-80.
doi:<https://doi.org/10.19184/jauj.v13i2.1890>

